

---

## Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)

---

### ANALISIS TARGET DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TARGET ANALYSIS AND BUDGET REALIZATION OF REGIONAL EXPENDITURE AND REVENUE OF THE GOVERNMENT OF MAGELANG DISTRICT

**Evita Febriyana**

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

[efebriyana52@gmail.com](mailto:efebriyana52@gmail.com)

---

#### **Abstrak**

*Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan mengenai target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang. Penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif merupakan yang dipilih dalam penulisan ini untuk menjelaskan mengenai target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemerintah Kabupaten Magelang. Hasil dari penelitian target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang periode tahun 2016 hingga tahun 2018 menunjukkan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Magelang belum cukup baik dan efektif dalam merealisasikan pendapatannya. Tingkat realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Magelang sudah mulai cukup baik dalam merealisasikannya.*

**Kata kunci:** *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*

#### **Abstract**

*The purpose of this study is to describe the target and realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget in the Magelang Regency Government. Research with a qualitative descriptive approach was chosen in this paper to explain the targets and realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget of the Magelang Regency Government. The results of the target research and the realization of the Regional Budget of Revenue and Expenditure (APBD) of Magelang Regency in the period of 2016 to 2018 showed that the regional revenue of Magelang Regency was not good enough and was effective in realizing its revenue. The level of expenditure realization in the Magelang Regency Government has begun to be quite good in realizing it .*

**Keywords:** *Regional Revenue and Expenditures Budget*

---

## **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah merupakan wewenang yang dimiliki oleh daerah otonom yang digunakan untuk menyelenggarakan, mengontrol dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menambah pelayanan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang adil dan menyeluruh serta berkesinambungan. Bagian dari pembangunan nasional yaitu pembangunan daerah yang diarahkan untuk menyeimbangkan daerah dan meningkatkan laju pertumbuhan antardaerah, antarkota, maupun antardesa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa keuangan daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk seluruh kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hak merupakan hak daerah yang dipakai untuk mencari sumber penerimaan lain yang sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban merupakan kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang yang akan digunakan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan semua urusan pemerintah daerah. Menurut Siregar (2015:11) pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Anggaran daerah merupakan alat yang digunakan untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, pemilihan keputusan dan perencanaan pembangunan, sumber pengembangan untuk mengevaluasi kinerja dan alat untuk mengkoordinasi semua aktifitas unit kerja.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana anggaran keuangan daerah yang disusun tahunan yang berisikan mengenai rencana penerimaan, rencana pengeluaran, dan rencana pembiayaan daerah dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah mendeskripsikan tentang penjabaran kuantitatif dari target dan tujuan pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang mengarah pada pencapaian tingkat kinerja tertentu. Artinya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mampu memberikan gambaran secara nyata mengenai tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan riil masyarakat untuk satu periode waktu tertentu. Dengan demikian, pengalokasian dana yang digunakan untuk membiayai berbagai macam aktivitas kegiatan dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan pelayanan public yang berorientasi pada kepentingan bersama.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Analisis laporan keuangan digunakan untuk membantu memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan. Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama karena anggaran pemerintah merupakan tumpuan dari penyelenggaraan pemerintahan. Namun dalam penerapannya realisasi anggaran belum mencapai target yang ingin dicapai. Anggaran ini memiliki peran utama dalam stabilitas, distribusi, pengalokasian sumber daya publik, perencanaan dan pengelolaan organisasi serta penilaian kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

## LANDASAN TEORI

### Akuntansi Sektor Publik

Halim (2012:3) akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan, dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi public yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Menurut Bastian (2010:3) akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan social maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor public dan swasta. Akuntansi sektor publik berkaitan dengan tiga hal yaitu memberika informasi, pengelolaan manajemen dan akuntabilitas.

### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan oleh peraturan daerah. Mahsun (2013:145) menyatakan bahwa anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran merupakan rencana jangka pendek sebuah organisasi yang mengartikan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih kongkrit.

### PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Peraturan pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, mengemukakan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut peranturan Menti Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari tiga bagian yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah merupakan penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan dapat berupa arus kas aktiva masuk, peningkatan atau pengurangan utang yang tidak berasal dari kontribusi pemerintah daerah.
- b. Belanja daerah merupakan keseluruhan pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan memperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah daerah.
- c. Pembiayaan daerah merupakan sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran. Pendapatan dalam APBD meliputi seluruh penerimaan anggaran melalui rekening kas umum daerah. Penerimaan pembiayaan digunakan untuk membayarkan kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman dan penyertaan modal pemerintah daerah.

Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dikelompokkan mejadi :

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Dana perimbangan terdiri dari : Bagi hasil pajak, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak penghasilan, bagi hasil serta dana alokasi umum.
3. Lain-lain pendapatan yang sah yaitu SAP mengatur penyajian belanja pada laporan realisasi anggaran berdasarkan karakter belanja dan jenis belanja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja langsung dikelompokkan menjadi :

1. Belanja langsung  
Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari :
  - a. Belanja Pegawai
  - b. Belanja barang dan jasa
  - c. Belanja modal
2. Belanja tidak langsung  
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan berbagai macam program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari :
  - a. Belanja pegawai
  - b. Belanja bunga
  - c. Belanja subsidi
  - d. Belanja hibah
  - e. Belanja bantuan social
  - f. Belanja bagi hasil

### **Anggaran**

Nafarin (2012:19) anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan uang dan jangka waktu tertentu. Anggaran memiliki makna penerimaan dan pengeluaran dalam periode satu tahun. Anggaran sektor publik merupakan rencana kegiatan dan keuangan secara periodic yang berisi program dan kegiatan serta jumlah dana yang diperoleh dan dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsi anggaran menurut Muchlis dan Bahtiar (2002) yaitu :

1. Sebagai pedoman pengelolaan Negara, anggaran menggambarkan rencana pelaksanaan didalam penyelenggaraan Negara dalam satu periode tertentu. Pemerintah dapat mengukur kemampuan

keuangan untuk membiayai pembangunan melalui anggaran

2. Sebagai alat prioritas, karena jumlah pendapatan yang terbatas sementara jumlah belanja selalu meningkat. Dengan adanya skala prioritas tersebut maka pemerintah dapat mendahulukan anggaran belanja yang sangat diperlukan dan mengurangi bahkan menghapuskan anggaran belanja yang tidak dibutuhkan, dengan kata lain dalam hal belanja Negara penggunaan anggaran diharuskan berhemat dan efisien.
3. Sebagai alat negosiasi politik, adanya sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah merupakan sarana negosiasi politik dengan parlemen dari beberapa partai politik dengan tujuan yang berbeda. Identifikasi kebutuhan anggaran yaitu : sebagai alat perencana, sebagai alat pengendalian dan sebagai alat evaluasi.

### **Analisis Laporan Realisasi Anggaran**

Analisis merupakan penggalian tentang sesuatu yang akan dikaji dengan memaparkan fakta-fakta yang ada untuk dicari keterkaitannya. Laporan realisasi anggaran merupakan komponen dalam laporan keuangan untuk periode tertentu yang didalamnya menyajikan tentang realisasi dan anggaran. Anggaran merupakan alat ekonomi yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perubahan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Magelang. Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode analisis data yang bersifat deskriptif. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2018. Lokasi penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang.

### Teknik Analisis Data

Data sekunder diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1. Target dan Ralisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang**

Tahun Anggaran	Target Anggaran	Realisasi	Prese ntase
2016	2.168.440.109.680,00	2.036.308.197.125,00	93,91 %
2017	2.168.655.957.155,00	2.271.336.015.858,00	103,87 %
2018	2.355.843.093.000,00	2.302.190.543.616,00	97,72 %

Pada tabel 1 diatas merupakan hasil penelitian tentang target dan realisasi anggaran pendapatan daerah Kabupaten Magelang .Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak/ Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya selama periode tahun 2016-2018. Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Kabupaten Magelang belum cukup baik dalam merealisasikan pendapatannya. Selama periode tahun 2016 hingga tahun 2018 realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Magelang tidak mencapai jumlah yang telah dianggarkan sebelumnya. Presentase pada tahun 2016 sebesar 93,91 % dan yang paling tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 103,87% dapat dikatakan efektif karena upaya pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran untuk mencapai

sasaran-sasaran yang telah direncanakan dapat terrealisasi dengan baik dan pada tahun 2018 menurun sebesar 97,72 %. Untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Magelang maka Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat mengevaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memaksimalkan potensi daerah di Kabupaten Magelang. Sumber-sumber pendapatan alternatif harus digali dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada secara efektif dan efisien. Kontribusi pendapatan asli daerah diperkirakan akan terus meningkat, tetapi proporsi terbesar dalam struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh sumber pendapatan dari Dana Perimbangan, sehingga dalam mendorong peningkatan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah ,maka pemerintah daerah Kabupaten Magelang selalu berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi pendapatan yang ada. Hasil pencapaian PAD berasal dari sejumlah pemasukan antara lain pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam rangka pencapaian dan peningkatan pendapatan daerah yaitu dengan insentififikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan infrastruktur. Penggalian potensi pajak daerah dan retribusi daerah , memperluas basis penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Magelang.

**Tabel 2. Target dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang**

Tahun Anggaran	Target Anggaran	Realisasi	Prese ntase
2016	2.340.396.942.410,00	2.073.797.322.922,00	88,61 %
2017	2.417.344.682.330,00	2.451.441.154.742,00	101,41 %

2018	2.662.575 .016.000, 00	2.486.540. 561.169,00	93,3 9 %
------	------------------------------	--------------------------	-------------

Pada tabel 2 diatas merupakan target dan realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Magelang berupa belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pada tahun 2016 presentase belanja daerah sebesar 88,61 % dan dapat dikatakan cukup baik dalam merealisasikan belanja daerahnya karena realisasi belanja tidak melebihi target yang dianggarkan. Akan tetapi pada tahun 2017 belanja daerahnya sebesar 101,41 % dikatakan belum cukup baik dalam merealisasikan belanja daerahnya karena masih melampaui besarnya target yang dianggarkan. Pada tahun 2018 presentase belanja daerah menurun menjadi 93,39 %. Pengeluaran Belanja Pemerintah Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa proporsi terbesar Realisasi Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Magelang pada Belanja Tidak Langsung. Struktur Belanja Tidak Langsung ini didominasi oleh Belanja Pegawai. Belanja daerah diprioritaskan untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan public dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi kesenjangan peyediaan pelayanan public antar daerah.

**Tabel 3. Belanja Langsung dan Total Belanja Daerah Kabupaten Magelang**

Tahun Anggaran	Belanja Langsung	Total Belanja	Presentase
2016	693.753. 000.000, 00	2.073.797.3 22.922,00	33,43 %
2017	974.834. 178.125, 00	2.451.441.1 54.742,00	39,76 %
2018	997.431. 927.908,	2.486.540.5 61.169,00	40,11

	00		%
--	----	--	---

Pada tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa belanja langsung Kabupaten Magelang yaitu pada tahun 2016 sebesar 33,43 %, tahun 2017 sebesar 39,76 %, dan tahun 2018 sebesar 40,11% , sebagian besar dari dana tersebut digunakan untuk belanja modal. Dapat diketahui bahwa perkembangan Belanja Langsung sulit ditingkatkan karena tingginya proporsi Belanja Tidak Langsung. Rata- rata belanja langsung digunakan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

**Tabel 4. Belanja Tidak Langsung dan Total Belanja Daerah Kabupaten Magelang**

Tahun Anggaran	Belanja Tidak Langsung	Total Belanja	Presentase
2016	1.380.044 .322.922, 00	2.073.797. 322.922,00	66,5 4 %
2017	1.476.606 .976.617, 00	2.451.441. 154.742,00	60,2 3 %
2018	1.489.108 .633.261, 00	2.486.540. 561.169,00	59,8 8 %

Pada tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa belanja tidak langsung Kabupaten Magelang yang terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga dengan presentase tahun 2016 sebesar 66,54 %, pada tahun 2017 sebesar 60,23 % dan pada tahun 2018 sebesar 59,88 %. Belanja tidak langsung terdiri dari Belanja Hibah, diikuti dengan Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Tidak Terduga, Belanja Pegawai, Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa dan Belanja Bantuan Sosial.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa target dan realisasi anggaran pendapatan daerah Kabupaten Magelang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dapat dikatakan belum cukup baik dalam merealisasikan karena realisasinya tidak mencapai jumlah yang telah dianggarkan. Dalam hal ini untuk meningkatkan pembangunan daerah di Kabupaten Magelang maka Pemerintah Kabupaten Magelang harus meningkatkan pengelolaan dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target dan realisasi belanja daerah Kabupaten Magelang berupa belanja langsung dan belanja tidak langsung dikatakan cukup baik pada tahun 2016 dan 2018, sedangkan pada tahun 2017 dapat dikatakan belum cukup baik karena dalam merealisasikan belanja daerahnya masih melampaui besarnya target yang di anggarakan.

### Saran

Saran dari penulis untuk hasil penelitian pada target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang maka Pemerintah Kabupaten Magelang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah nya harus berusaha lagi lebih keras dan dalam pengalokasian dana juga harus lebih memperhatikan lagi. Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kinerja pengelolaan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang agar menjadi daerah yang tidak berketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi.

## DAFTAR PUSTAKA

Daling, M. (2013). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa

Tenggara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 82–89. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.1942>

Palar, D., Ventje Ilat, & Tirayoh, V. Z. (2017). Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Manado. *Jurnal Risiko*, 5(2), 1935–1943. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/16371/15873>

Rukayah, Kusumawati, N., & Afriani, R. I. (2017). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 1–11.

Sajow, C., Morasa, J., & Wokas, H. (2017). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Tomohon Dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 1214–1224.

Shiyan, L. N., Machekhina, K. I., Tropina, E. A., Gryaznova, E. N., & An, V. V. (2013). Effect of humic substances and silicon ions on stability of iron hydroxide (III) nanoparticles. *Advanced Materials Research*, 872, 237–240. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.872.237>

Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 93–101.

Tulangow, A., & Runtu, T. (2016). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(3), 564–571. <https://doi.org/10.35794/emba.v4i3.14290>

Utami, E. S. (2015). Pengaruh proses

penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap pengalokasian belanja daerah di Pemerintahan Kabupaten Magelang Tahun 2013. *Jurnal Sosio-Humaniora*, 6(1). <http://ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/soshum/article/viewFile/153/142>